

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rojak Jeje, 2004, Hukum Tata Negara Islam, Penerbit Surabaya UIN Sunan Ampel Pers.
- Abdurrahman Fatoni, 2011, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana.
- Atep Adya Barata. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Jakarta: Liberty.
- Djazuli A, 2003, Fiqh siyasah, Kencana Media Group. 2003.
- Dr. ardiansyah, S.H., M.H, 2023, Hukum Perizinan, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. dan Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, 2020, Hukum Perizinan Berbasis OSS, Jawa Tengah:Lakeisha,
- Huda Ni'matul, 2009, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka pelajar, Jakarta.
- Imam Gunawan, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,
- Iqbal Muhammad, 2014, Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Poliitk Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal Muhammad, Fiqih Siyasah, 2001, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Kadir Abdul, 2014, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi.
- Keiser Keiser Gerd, 2011, *Optical Fiber Communication*, 4th ed, New York: McGraw-Hill.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi*, Jakarta: Kominfo.
- Lewis. Carol W. and Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass
- Lexy J. Moleong, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M dan Saldana J, 2014, Qualitativ Data Analysis, A Methods Sourcebook, Jakarta: UI Press.
- Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
- Muslim chaniago, Suharizzal, 2017, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta.
- Nogi S Hessel, 2003, Teori Dan Konsep Kebijakan Publik : Dalam kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi Dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

- Nugraha arif ahaditya zulfi. 2015. Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Journal. Universitas negeri yogyakarta
- S. Tanenbaum Andrew, 2010, *Computer Network*, 5th ed, Boston: Pearson Education.
- Santoso Az Lukman, 2015, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Shant Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Jakarta: Liberty.
- Sjadzali Munawir, 2014, Islam dan Tata Negara, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Solihin Dadang. dkk, 2001 Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sri Rahayu Ani, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2011, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Sugiono, 2010, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, Bandung: Alfabeta,
- Suharto Edi, 2010, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Sukandar, Rumidi, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika.
- Syarif Ibnu Mular, Zada Khamami, 2008, Fiqih Siyasah, Jakarta : Erlangga.
- Victor Haryanto Edy, 2012, *Jaringan Komputer*, Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Wahyudi Muhammad, 2023, *Membangun Jaringan Komputer dengan Mikrotik*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Winarno Budi, 2002, Apakah kebijakan publik? Dalam teori dan proses kebijakan publik, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yoni Ardianto, 1999, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif", Artikel DJKN, Gertude Jaeger Selznick, ph D. Pada Sofear.

Jurnal

- Evyta Wismiana, Fauzan Kamil dan Ubaidillah Zuhdi, 2021, "PerencanaanPenjaluran Jaringan Fiber Optic Pada Kluster Perumahan", Jurnal Elektro Teknik, Vol. 1 No. 2
- Hariyadi, M.Kom, 2018, "Sistem Komunikasi Fiber Optic dan Pemanfaatannya pada PT. Semen Padang", Rang Teknik Journal, Vol. 1 No. 1.
- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi dan Sely Agustina, 2021, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia, Cakrawala : Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 5 No. 2.
- Mutiara Chandrawati Ika, Ibnu Sasongko, dkk. 2020, *Pemanfaatan Komponen Ruang Publik yang Efektif pada Jalan Veteran-Jalan Bandung Kota Malang*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 2 No. 2
- Nasution M, 2022, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kabel dan Tiang Telekomunikasi", *Jurnal Hukum &Teknologi*, Vol. 3 No. 1.

- Vinda Cahyani Putri, Wahyu Adi Mudiparwanto, 2024, “Implementasi Pemberian Izin Usaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) Setelah Berlakunya Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Provinsi Jambi”, dalam Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol.6 No.3.
- Winarno H, 2021, “Perizinan Infrastruktur Telekomunikasi dan Penataan Ruang Kota”, *Jurnal Infrastruktur dan Regulasi*, Vol. No. 2.
- Winarno, H. 2021. “Perizinan Infrastruktur Telekomunikasi dan Penataan Ruang Kota”. *Jurnal Infrastruktur dan Regulasi*. Vol. No. 2.

Peraturan Perundang – Undangan

- Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 12-14
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Website

Detik Global News, <https://detikglobalnews.com/> Diakses pada tanggal Maret 2025

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Pedoman Transliterasi Penulisan Skripsi*, <https://fasih.uinsatu.ac.id/download/category/2-dokumen-skripsi>, diakses tanggal 12 Februari 2025.

<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pelayanan-publik.html>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2024

Radar Tulungagung, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung> Diakses pada tanggal 30 Desember 2024

Radar Tulungagung, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung> Diakses pada tanggal 30 Desember 2024